

**EVALUASI DOKUMEN MATA PELAJARAN KEWARGANEGARAAN DI SMA
(Kurikulum KTSP, Kurikulum 2013, dan Merdeka Belajar)**



Intelligentia - Dignitas

Oleh:

Bambang Afriadi (9913921008)

Disertasi ini Ditulis untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Doktor

**PROGRAM STUDI PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dengan membandingkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Atas. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan difference-in-differences dan matching model berdasarkan data survei midline dan follow-up dengan model evaluasi Effectiveness Model, Objectives-Centered Model, dan Matching Model. Kurikulum KTSP, yang diterapkan sebagai hasil desentralisasi pendidikan, memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal, menekankan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan pembentukan karakter. Namun, metode pengajaran KTSP terkadang dianggap monoton dan kurang inovatif. Kurikulum 2013, dengan pendekatan ilmiah dan berbasis kompetensi, berfokus pada pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan siswa berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Meskipun menawarkan penilaian autentik dan metode pembelajaran yang lebih interaktif, Kurikulum 2013 sering menghadapi kendala dalam hal kesiapan guru dan sarana prasarana. Jam pelajaran yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri.

Kurikulum Merdeka Belajar, yang diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas lebih dalam pengembangan kurikulum oleh sekolah dan guru, bertujuan untuk mengadaptasi pembelajaran dengan perubahan sosial dan teknologi serta memperkuat karakter bangsa. Walaupun mendorong kreativitas dan kemandirian, Kurikulum Merdeka memerlukan sumber daya tambahan yang seringkali menjadi kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan. KTSP menawarkan fleksibilitas tetapi mungkin kurang inovatif; Kurikulum 2013 fokus pada keterampilan sosial dan penilaian autentik namun menghadapi masalah dalam penerapan dan durasi jam pelajaran; Kurikulum Merdeka Belajar mendukung kreativitas tetapi memerlukan sumber daya tenaga pendidik yang kompeten. Evaluasi ini mengungkapkan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, dengan menekankan pentingnya adaptasi kurikulum terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan lokal serta dukungan yang memadai dari pemerintah.

Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan pemangku kepentingan dalam merancang kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ideal dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Kurikulum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, mengakomodasi kebutuhan lokal, dan tetap relevan dengan standar nasional.

Kata Kunci: Evaluasi Kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan, KTSP, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka Belajar.

ABSTRACT

This study evaluates the Civic Education curriculum in Indonesia by comparing the School-Based Curriculum (KTSP), the 2013 Curriculum, and the Merdeka Curriculum implemented at the high school level. The evaluation utilizes a difference-in-differences approach and matching model based on midline and follow-up survey data, incorporating the Effectiveness Model, Objectives-Centered Model, and Matching Model. The KTSP, introduced as a result of educational decentralization, grants *schools'* autonomy to design their curriculum according to local needs, emphasizing the understanding of Pancasila values and character formation. However, KTSP's teaching methods are often considered monotonous and lacking in innovation. The 2013 Curriculum, featuring a scientific and competency-based approach, focuses on the development of students' spiritual, social, cognitive, and skill competencies. While offering authentic assessments and more interactive teaching methods, the 2013 Curriculum faces challenges regarding teacher readiness and infrastructure. Additionally, its extended instructional hours pose significant challenges.

The Merdeka Curriculum, introduced to provide greater flexibility in curriculum development by schools and teachers, aims to adapt learning to social and technological changes while strengthening national character. Although it encourages creativity and independence, the Merdeka Curriculum often requires additional resources, which can be a limitation. The study's findings reveal that each curriculum has its advantages and disadvantages. KTSP offers flexibility but may lack innovation; the 2013 Curriculum emphasizes social skills and authentic assessments but struggles with implementation challenges and extended teaching hours; the Merdeka Curriculum supports creativity but demands a highly competent teaching workforce. The evaluation highlights the need for continuous improvement to achieve educational goals effectively, stressing the importance of curriculum adaptation to contemporary developments and local needs, along with adequate government support.

This study provides valuable insights for policymakers, educators, and stakeholders in designing an ideal Civic Education curriculum that can be continuously evaluated. An effective curriculum must adapt to social and technological changes, accommodate local needs, and remain aligned with national standards.

Keywords: Curriculum Evaluation, Civic Education, KTSP, 2013 Curriculum, Merdeka Curriculum.